

LAPORAN KINERJA

KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN
DAN TENGAH

20
22





KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segenap Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab serta dapat meraih target yang telah ditetapkan dengan baik. Cerminan dari rasa syukur ini terlihat dalam aktivitas kerja di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu bekerja dengan semangat, memberikan yang terbaik, dan hasil kinerja yang membanggakan.



Pandemi Covid-19 mewarnai kinerja di sepanjang tahun 2022 yang berdampak pada cara bekerja dan cara pandang dengan beradaptasi pada tatanan normal baru. Pegawai dituntut dapat bekerja secara daring dengan target yang ketat serta menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

Hasil yang telah dicapai cukup menggembirakan dan memuaskan yaitu dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 113,97%. Selain itu, terdapat beberapa prestasi yang cukup membanggakan yaitu berhasil mendapatkan Juara I Lomba Kolaborasi Digital Kemenkeu Kategori Kantor Wilayah Tahun 2022 serta membuat inovasi berupa SI BEKANTAN KANWIL KST yang merupakan wujud peningkatan pelayanan dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai alat bantu sistem money yang memudahkan dalam monitoring dan evaluasi sasaran strategis dan mendapatkan informasi terkait capaian kinerja secara cepat dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Aplikasi ini dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses menggunakan browser melalui alamat <https://sites.google.com/view/si-bekantan>.

Harapan di tahun 2023, kinerja yang sudah baik dapat dipertahankan serta ditingkatkan lebih baik lagi dengan perencanaan dan implementasi yang tepat serta money yang terukur. Dengan tatanan normal baru, diharapkan dapat merubah *mindset* pegawai dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya serta menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat kepada organisasi secara luas.

Banjarbaru, 25 Januari 2023
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Aspek Strategis	6
D. Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021-2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi 2022	18
1) Nilai Kinerja Organisasi Per Triwulan IV Tahun 2022	18
2) Evaluasi dan Analisis Kinerja	29
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	29
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	35
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	38
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	39
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	44
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	46
7. Edukasi yang Efektif	47
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	49
9. SDM yang Kompeten	50
10. Organisasi yang Fit For Purpose	51
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	53
12. Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	54
B. Realisasi Anggaran	56
C. Inovasi	64
D. Prestasi dan Penghargaan	66
BAB IV PENUTUP	71



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, agar lebih efektif dan efisien maka dibentuk unit-unit vertikal DJKN di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki wilayah kerja mencakup 3 KPKNL yaitu KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin. Sebagai instansi pemerintah, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Untuk mendukung tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menjalankan fungsi. Tugas dan Fungsi dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis



beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.



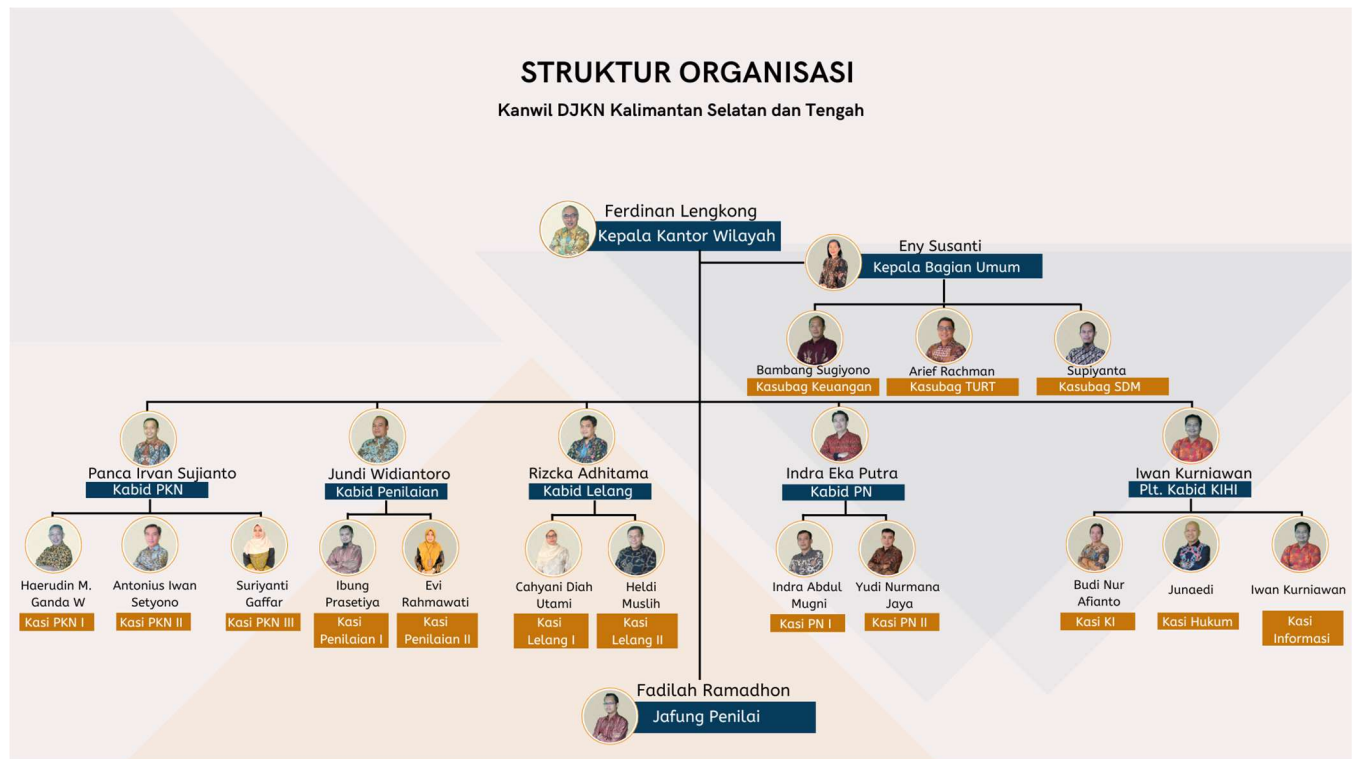
c. Aspek Strategis

Terdapat empat peran strategis DJKN yaitu:

1. Pengemban amanat UUD 1945.
 2. Kontributor perekonomian nasional.
 3. Aktor penting Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 4. *Emerging Organization*.
-
- 1) Sebagai pengemban amanat UUD 1945, DJKN menjalankan amanat pada pasal 33 ayat 2 dimana Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan cara meningkatkan fungsinya sebagai koordinator kekayaan negara. Agar fungsinya selaku koordinator berjalan baik maka DJKN mencanangkan enam langkah inisiatif manajemen aset:
 - Inventarisasi dan penilaian Sumber Daya Alam.
 - Digitalisasi pengelolaan aset.
 - Regulasi optimalisasi aset Kementerian dan Lembaga.
 - Optimalisasi aset BUN.
 - Memaksimalkan pemanfaatan dan Return On Asset.
 - Kajian portofolio aset setiap tahun.
 - 2) Selaku kontributor perekonomian nasional, posisi strategis DJKN adalah:
 - Menjaga keberlangsungan BUMN "*Guardian BUMN*"
 - Penghasil alternatif PNBP.
 - Pengaman APBN dalam hal pengendali belanja negara.
 - Pengelola misi khusus "*Special mission*" yaitu misi pembangunan yang cakupannya diluar perhal keuangan secara umum, dimana DJKN sebagai pemegang manajemen kendali.
 - 3) Sebagai aktor penting LKPP, fungsi strategis DJKN adalah mengelola aset sebagai pos terbesar neraca. Aset yang dikelola berupa aset BUN seperti aset properti eks BPPN, properti eks PT PPA (Persero), aset KKKS, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMAT), aset yang berasal dari APBN, aset yang timbul karena perjanjian lainnya.
 - 4) Fungsi strategis DJKN yang keempat adalah *emerging organization*, yaitu organisasi dengan proses bisnis modern dan organisasi dengan *multi task* yang menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara, lelang, penilaian, dan pengurusan piutang negara.



D. Struktur Organisasi



Keterangan:

Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan Desember 2022):

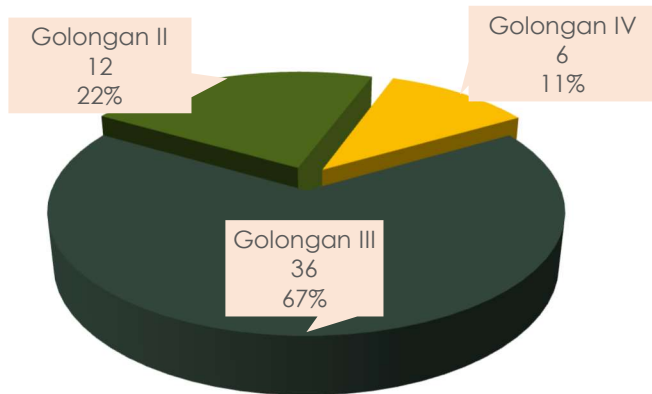
1. Plt. Kabid KIH diemban oleh Kepala Seksi Informasi



1) Matriks Pegawai

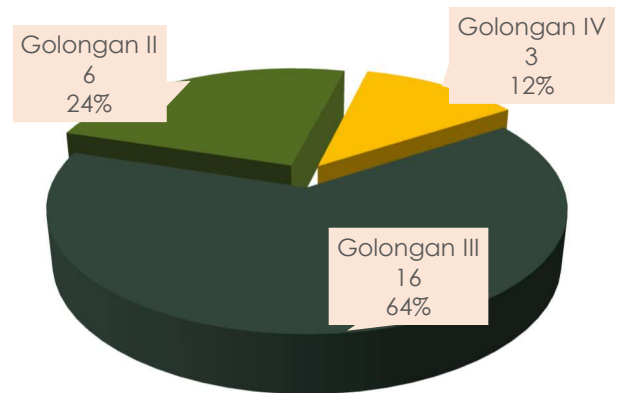
1. Golongan Kepangkatan

KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH



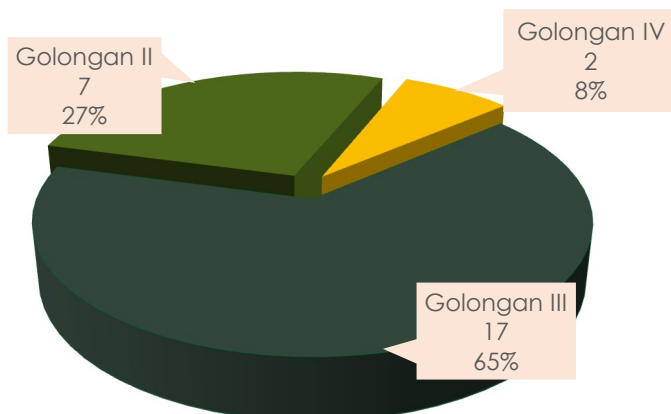
■ Golongan IV ■ Golongan III ■ Golongan II

KPKNL PALANGKARAYA



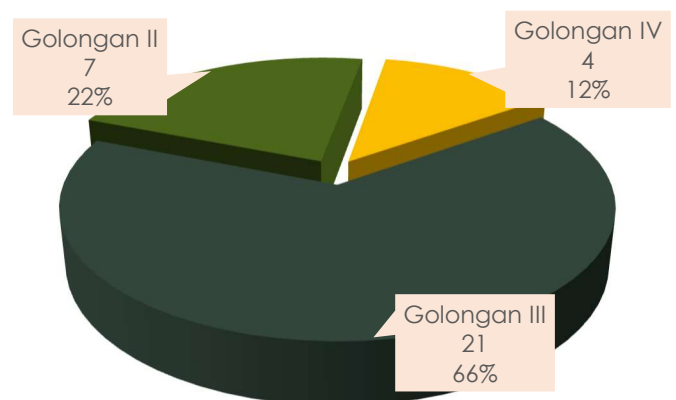
■ Golongan IV ■ Golongan III ■ Golongan II

KPKNL PANGKALAN BUN



■ Golongan IV ■ Golongan III ■ Golongan II

KPKNL BANJARMASIN

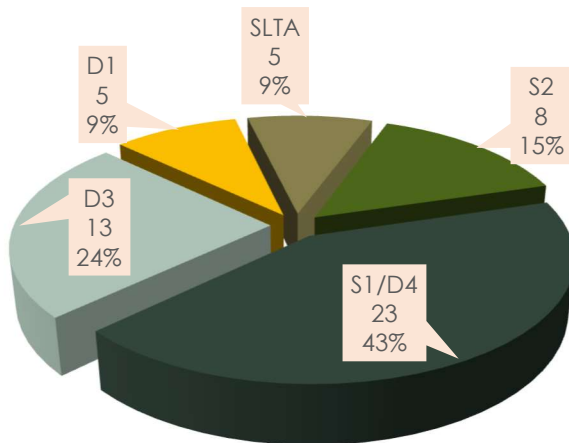


■ Golongan IV ■ Golongan III ■ Golongan II



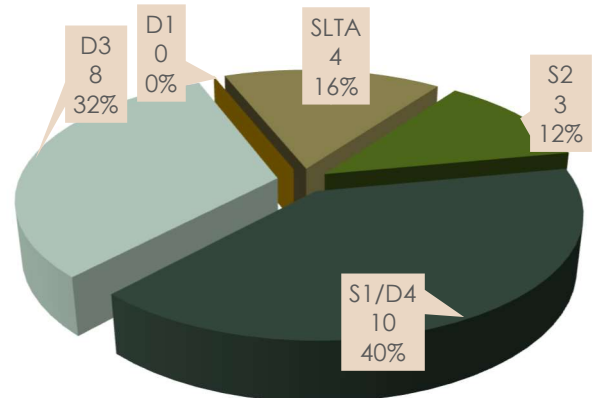
2. Pendidikan

**KANWIL DJKN KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH**



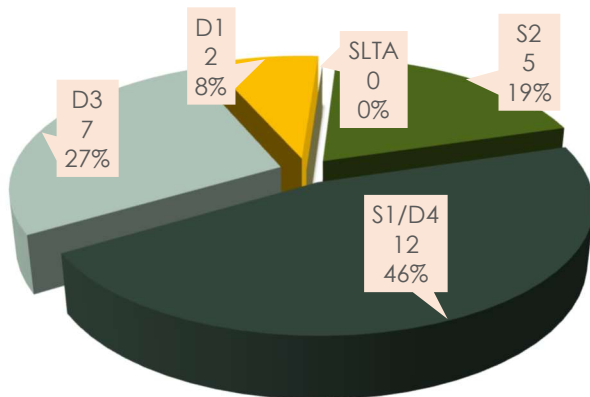
■ S2 ■ S1/D4 ■ D3 ■ D1 ■ SLTA

KPKNL PALANGKARAYA



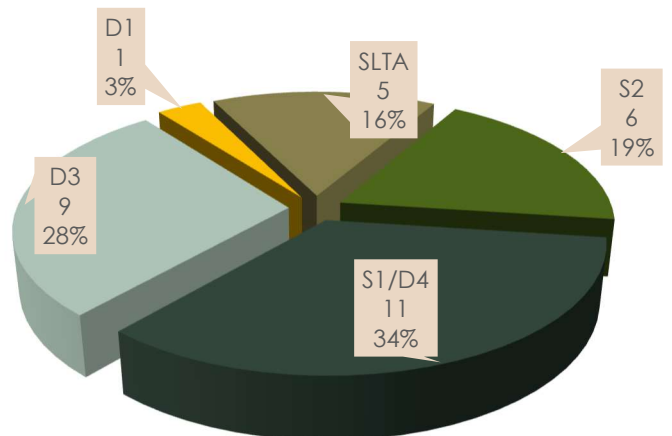
■ S2 ■ S1/D4 ■ D3 ■ D1 ■ SLTA

KPKNL PANGKALAN BUN



■ S2 ■ S1/D4 ■ D3 ■ D1 ■ SLTA

KPKNL BANJARMASIN

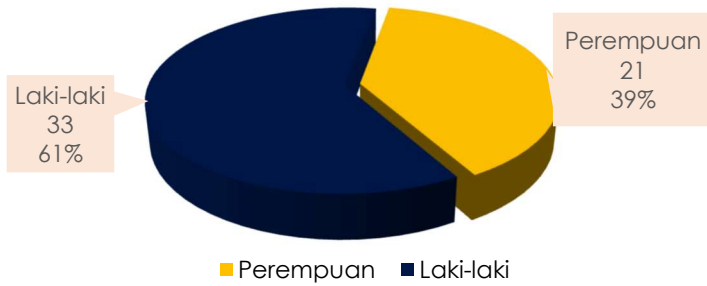


■ S2 ■ S1/D4 ■ D3 ■ D1 ■ SLTA



3. Jenis Kelamin

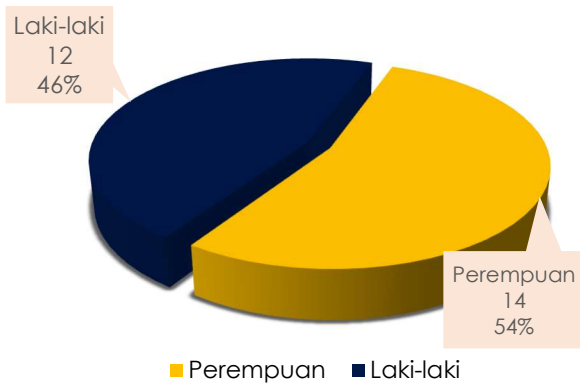
KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH



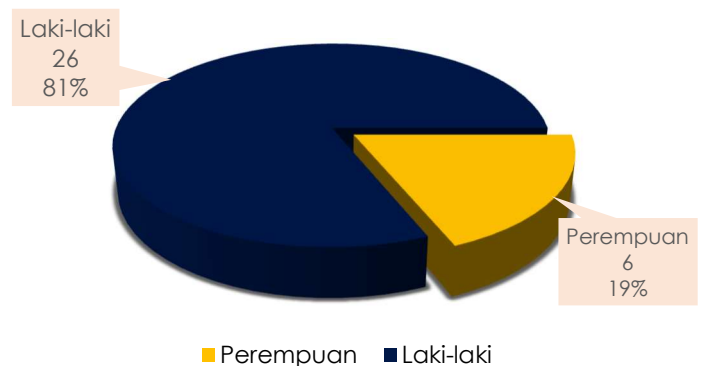
KPKNL PALANGKARAYA



KPKNL PANGKALAN BUN



KPKNL BANJARMASIN





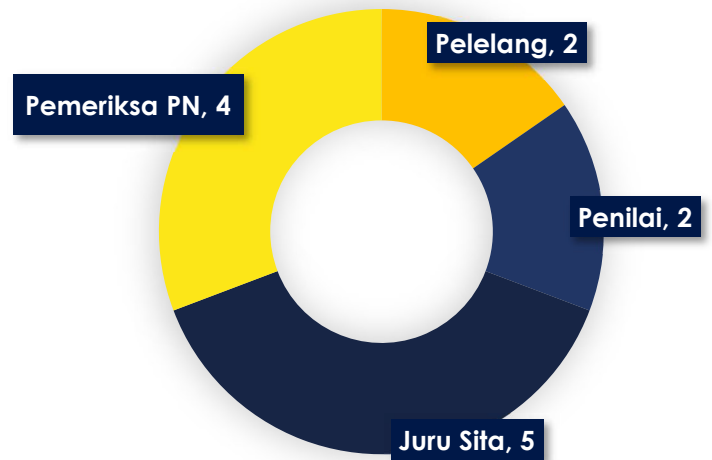
4. Jabatan Fungsional

KANWIL DJKN KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH



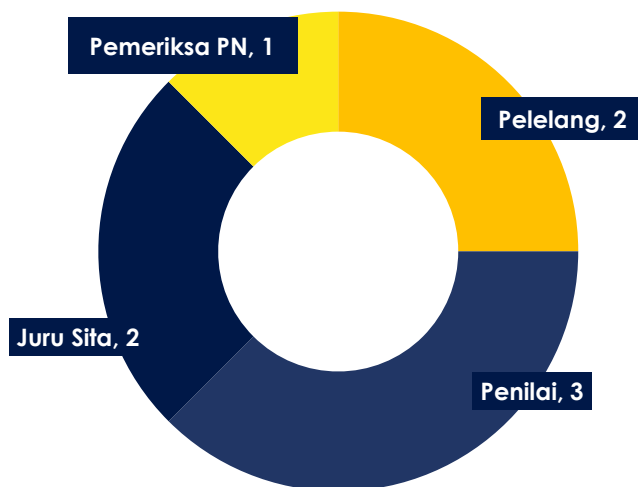
■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN

KPKNL PALANGKARAYA



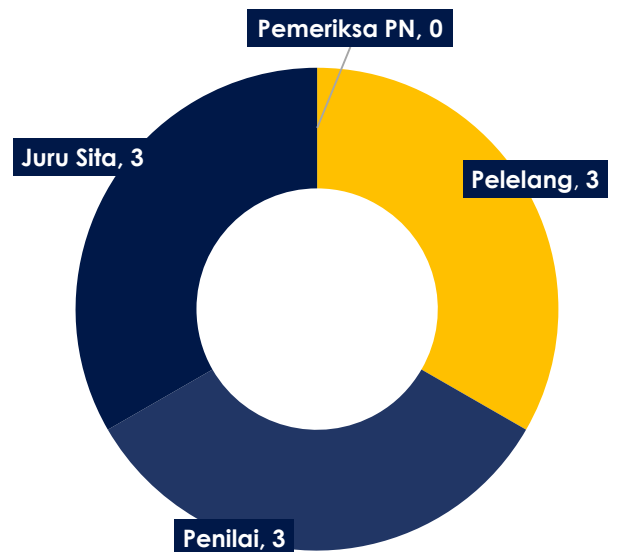
■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN

KPKNL PANGKALAN BUN



■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN

KPKNL BANJARMASIN



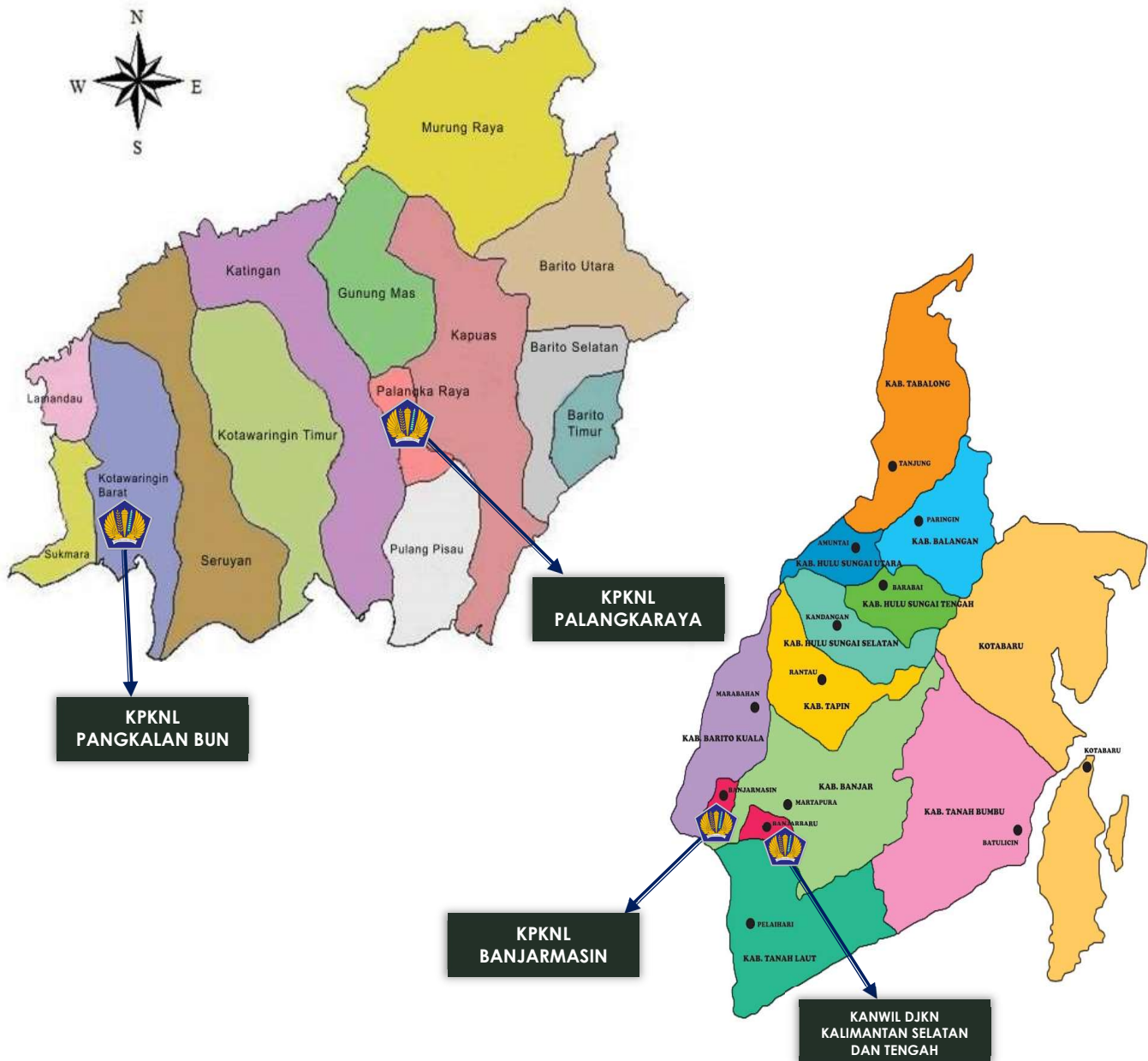
■ Pelelang ■ Penilai ■ Juru Sita ■ Pemeriksa PN



2) Wilayah Kerja

Kanwil DJKN Kalimantan Tengah dan Selatan membawahi :

1. KPKNL Palangkaraya (9 Kabupaten/Kota)
2. KPKNL Pangkalan Bun (5 Kabupaten/Kota)
3. KPKNL Banjarmasin (13 Kabupaten/Kota)





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial							
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	55%	57%	60%	65%	70%	Dit. BMN
		Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN (Lead)
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN (Lead)
		Indeks implementasi pengasuransian BMN	50 (Skala 100)	55 (Skala 100)	60 (Skala 100)	65 (Skala 100)	70 (Skala 100)	Dit. BMN
		Persentase efektivitas penyelesaian BKP	100%	100%	100%	100%	100%	Dit PNKNL
		Indeks efektivitas penyelesaian peraturan	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	Dit Huhu (Lead)



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tingkat akurasi data piutang negara	-	-	50%	100%	-	Dit. PNKNL
	Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	Dit. KND
2.	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya							
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. Lelang
		Persentase produktivitas lelang	32%	34%	34%	34%	34%	Dit. Lelang
3.	Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien							
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	29%	28%	27%	26%	Dit. Penilaian
		Pemenuhan Target Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) Penilai Pemerintah	-	100%	100%	100%	100%	Dit. Penilaian
4.	Birokrasi dan layanan publik DJKN yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)	4,10 (Skala 5)	4,15 (Skala 5)	4,20 (Skala 5)	Setditjen (Lead)
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Setditjen
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Setditjen
		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	87,83 %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	Setditjen
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	Setditjen (Lead)



Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. PKNSI
	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	85%	87%	90%	92%	95%	Dit. PKNSI
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Setditjen
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	89%	89,5%	89,5 %	90%	90%	Setditjen (Lead)
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	70%	75%	75%	80%	80%	Dit. BMN (Lead)
Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	Dit. Huhu



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021-2024

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA										
PROGRAM	PENGLOLAAN PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN RISIKO					109.508,038	122.897,695	125.237,308	127.625,089	DJKN
Sasaran Program 2	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial									
Indikator Program	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	57%	60%	65%	70%					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					10.623,490	10.765,844	10.910,107	11.056,302	
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas kebijakan	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
Kegiatan 2	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					6.305,885	6.390,383	6.476,015	6.562,793	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
Kegiatan 3	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					1.735,365	1.758,618	1.782,184	1.806,065	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%					
Kegiatan 5	Pengelolaan Aset					90.141,028	103.271,168	105.347,785	107.469,046	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
	b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 6	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara					354,995	359,751	364,572	369,457	
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu									
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	89,5%	90%	90%					
Kegiatan 7	Movev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					347,274	351,928	356,644	361,423	
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	75%	75%	80%	80%					
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN					745.722,618	745.830,973	757.231,895	768.830,822	
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal									
Indikator Kinerja Program 1	a. Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,05 (skala 5)	4,1 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,2 (skala 5)					
	b. Tingkat implementasi learning organization	77%	80%	82%	85%					
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi									
Indikator Kinerja Program 2	a. Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%					
	b. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah									
Indikator Kinerja Program 3	Indeks integritas	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM					388.722,817	396.880,243	403.498,344	410.244,768	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	-	-					
Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
(1)	(2)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum					332.030,434	323.452,317	327.880,669	332.375,220	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95%	95%	95%	95%					
	b. Tingkat kualitas pengelolaan BMN	80%	80%	80%	80%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi					17.217,010	17.552,265	17.794,580	18.038,994	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					1.934,494	1.960,416	1.986,685	2.013,307	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi					3.416,370	3.462,149	3.508,542	3.555,556	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi	72,5	75	77,5	80					
Kegiatan 6	Pengendalian dan Pengawasan Internal					2.401,492	2.523,581	2.563,074	2.602,975	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif									



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 2022

1) Nilai Kinerja Organisasi Per Triwulan IV Tahun 2022

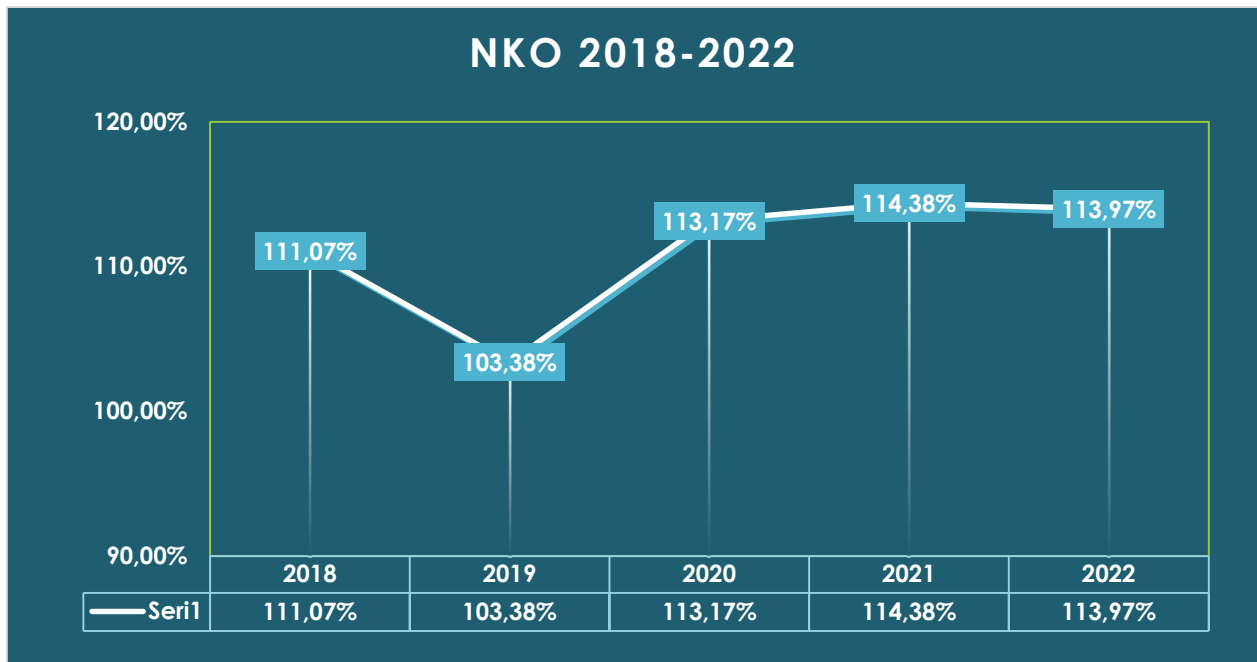
Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)				30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian				120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	285,49%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	47,34%	120,00%	hijau
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	P/M	80%	100,00%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)				15,78%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				104,85%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	106,60%	106,60%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	103,11%	103,11%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				105,58%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,55	4,80	105,58%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)				34,55%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				118,05%	



4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	78,60%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	114,05%	114,05%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	160,61%	120,00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	130,27%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	1,38%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				113,87%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	99,12%	107,74%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	0,01%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif				106,26%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	95,63	106,26%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				117,65%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100,00%	117,65%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)				33,64%	
9	SDM yang Kompeten				120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose				120,00%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	97,99	120,00%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				98,12%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	93,70%	98,12%	kuning
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif				110,42%	
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	3,92	110,42%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					113,97%	hijau



Dalam kurun 5 tahun terakhir (2018-2022) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengalami kenaikan secara signifikan dikarenakan adanya penerapan penguatan rencana strategis sudah diterapkan antara lain perbaikan database sehingga keputusan strategis yang diambil tepat sasaran dan penggalian potensi di semua IKU yang ada serta mengoptimalkan SDM dan sumber daya yang ada, namun pada tahun 2022 terdapat penurunan NKO dari 114,38% menjadi 113,97% hal ini disebabkan oleh indeks capaian maksimal yang tidak mencapai 120%.



1. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Total)

Komponen	Target Tahunan	Raw Target s.d. Desember (86,67%)	Realisasi s.d. Desember	Indeks Capaian s.d. Desember	Indeks Capaian Tahunan
PNBP Aset	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 56.333.428.408,00	120,00%	120,00%
PNBP PN	Rp 85.395.500,00	Rp 85.395.500,00	Rp 113.986.506,91	120,00%	120,00%
PNBP Lelang	Rp 7.800.000.000,00	Rp 7.800.000.000,00	Rp 8.888.940.962,00	113,96%	113,96%
TOTAL	Rp 22.885.395.500,00	Rp 22.885.395.500,00	Rp 65.336.355.876,91	120,00%	120,00%



2. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Aset)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember		
	Tahunan	s.d. Desember (100%)		s.d. Desember	Tahunan
KPKNL PKY	Rp 5.200.000.000,00	Rp 5.200.000.000,00	Rp 14.112.937.458,00	120,00%	120,00%
KPKNL PBN	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 3.166.600.925,00	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	Rp 8.800.000.000,00	Rp 8.800.000.000,00	Rp 39.053.890.025,00	120,00%	120,00%
Total Kanwil	Rp 15.000.000.000,00	Rp 15.000.000.000,00	Rp 56.333.428.408,00	120,00%	120,00%

3. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP PN)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember		
	Tahunan	s.d. Desember (100%)		s.d. Desember	Tahunan
KPKNL PKY	Rp 73.895.500,00	Rp 73.895.500,00	Rp 97.245.429,00	120,00%	120,00%
KPKNL PBN	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 2.276.168,91	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 14.464.909,00	120,00%	120,00%
Total Kanwil	Rp 85.395.500,00	Rp 85.395.500,00	Rp 113.986.506,91	120,00%	120,00%



4. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Lelang)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	s.d. Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100%)			
Kanwil (PL II)	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 826.242.990,00	55,08%	55,08%
KPKNL PKY	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.455.344.847,00	120,00%	120,00%
KPKNL PBN	Rp 700.000.000,00	Rp 700.000.000,00	Rp 534.761.674,00	76,39%	76,39%
KPKNL BJM	Rp 4.600.000.000,00	Rp 4.600.000.000,00	Rp 6.072.591.451,00	120,00%	120,00%
Total Kanwil	Rp 7.800.000.000,00	Rp 7.800.000.000,00	Rp 8.888.940.962,00	113,96%	113,96%

5. Persentase Produktivitas Lelang

Unit	Capaian s.d. Desember				
	Target s.d. Desember	Lot Laku + Lot Wanprestasi	Lot Keseluruhan	Realisasi	Indeks Capaian Tahunan
Kanwil (PL II)	36,00%	1.060	2.847	37,23%	103,42%
KPKNL PKY		319	551	57,89%	120,00%
KPKNL PBN		467	641	72,85%	120,00%
KPKNL BJM		798	1.546	51,62%	120,00%
Total Kanwil		2.644	5.585	47,34%	120,00%

6. Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Tahunan
	Target	Realisasi	
KANWIL	80%	100%	120%



7. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100%)			
Kanwil (PL II)	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00	Rp 137.658.170.000,00	68,83%	68,83%
KPKNL PKY	Rp 21.000.000.000,00	Rp 21.000.000.000,00	Rp 43.372.582.490,00	120,00%	120,00%
KPKNL PBN	Rp 17.000.000.000,00	Rp 17.000.000.000,00	Rp 17.392.233.082,00	102,31%	102,31%
KPKNL BJM	Rp 116.000.000.000,00	Rp 116.000.000.000,00	Rp 178.940.620.679,00	120,00%	120,00%
Total Kanwil	Rp 354.000.000.000,00	Rp 354.000.000.000,00	Rp 377.363.606.251,00	106,60%	106,60%

8. IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100%)			
KPKNL PKY	Rp 7.985.141.740,00	Rp 7.985.141.740,00	Rp 8.222.238.024,00	102,97%	102,97%
KPKNL PBN	Rp 70.000.000,00 (Addendum)	Rp 70.000.000,00	Rp 116.114.281,00	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	Rp 1.434.000.000,00 (Addendum)	Rp 1.434.000.000,00	Rp 1.445.443.384,00	100,80%	100,80%
Total Kanwil	Rp 9.489.141.740,00 (Addendum)	Rp 9.489.141.740,00	Rp 9.783.795.689,00	103,11%	103,11%

9. IKU Indeks Kepuasan Layanan Kanwil dan KPKNL

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Tahunan
	Target	Realisasi	
Kanwil (Bidang PKN)	4,55	4,65	102,20%
KPKNL PKY		4,83	106,15%
KPKNL PBN		4,94	108,57%
KPKNL BJM		4,80	105,49%
Total Kanwil (Rata-rata Kanwil dan KPKNL)		4,80	105,49%



10. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Unit	Target Tahunan	Target s.d. Desember	Realisasi s.d. Desember			Indeks Capaian	
			Pengukuran Optimalisasi	Pembobotan (75% Pengukuran + 25% Optimalisasi)		s.d. Desember	Tahunan
Kanwil	65%	65%	81,34%	70,38%	78,60%	120,00%	120,00%
KPKNL PKY	65%	65%	73,39%	75,90%	74,02%	113,87%	113,87%
KPKNL PBN	65%	65%	76,96%	78,19%	77,27%	118,87%	118,87%
KPKNL BJM	65%	65%	88,77%	65,86%	83,04%	120,00%	120,00%

Keterangan :

1. Capaian/Realisasi SBSK dihitung dari komponen **Pengukuran (75%) dan Optimalisasi (25%)**
2. Capaian/Realisasi berdasarkan review Bidang PKN

11. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Unit	Target dan Realisasi					Indeks Capaian s.d. Desember	Indeks Capaian Tahunan
	Target Tahunan (100%)		Realisasi				
	Nominatif	BBSK	Nominatif	BBSK	Total		
KPKNL PKY	456	191	366	287	653	100,93%	100,93%
KPKNL PBN	40	81	51	95	146	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	161	160	176	267	443	120,00%	120,00%
Total Kanwil	657	432	593	649	1.242	114,05%	114,05%

12. IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember	Desember	Tahunan
	Tahunan	s.d. Desember (100,00%)			
KPKNL PKY	9	9	24	120,00%	120,00%
KPKNL PBN	2	2	2	100,00%	100,00%
KPKNL BJM	22	22	27	120,00%	120,00%
Total Kanwil	33	33	53	120,00%	120,00%



13. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Unit	Target dan Realisasi				Indeks Capaian	
	Target		Realisasi s.d. Desember			
	Tahunan	s.d. Desember	Jumlah	%	Desember	Tahunan
KPKNL PKY	313	313	351	118,56%	118,56%	118,56%
KPKNL PBN	135	135	167	125,41%	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	261	261	344	148,66%	120,00%	120,00%
Total Kanwil	709	709	862	130,27%	120,00%	120,00%

Keterangan :

Target IKU = Target Evaluasi Kinerja + Target Penyampaian Rekomendasi

(Realisasi Evaluasi Kinerja 2020 + Realisasi Evaluasi Kinerja 2021 + Target Evaluasi Kinerja 2022)

Realisasi IKU = $\left[\frac{\text{Jumlah realisasi evaluasi kinerja}}{\text{Jumlah target evaluasi kinerja}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah realisasi penyampaian rekomendasi}}{\text{Jumlah target penyampaian rekomendasi}} \times 50\% \right]$

14. IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian	
	Target 2022	Realisasi s.d. Desember		
			Desember	Tahunan
Kanwil (Bid, Penilaian)	19%	0,00%	120,00%	120,00%
KPKNL PKY		0,21%	120,00%	120,00%
KPKNL PBN		0,01%	120,00%	120,00%
KPKNL BJM		5,29%	120,00%	120,00%
Total Kanwil (Rata-rata Kanwil dan KPKNL)		1,38%	120,00%	120,00%



15. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Unit	Capaian s.d. Desember									
	Target 2022	Frek. Lelang (A+B+C)	E-Auction (A)		E-Conventional Auction (B)		Konvensional Murni (C)		Capaian s.d. Desember	Indeks Capaian Tahunan
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
KPKNL PKY	92%	331	331	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%	108,70%
KPKNL PBN		212	212	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00%	108,70%
KPKNL BJM		820	771	94,02%	37	4,51%	12	1,46%	98,54%	107,10%
Total Kanwil		1.363	1.314	96,40%	37	2,71%	12	0,88%	99,12%	107,74%

16. IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Unit	Capaian s.d. Desember		
	Target	Realisasi	% Capaian
Kanwil (PL II)	10%	0,00%	120,00%
KPKNL PKY	10%	0,03%	120,00%
KPKNL PBN	10%	0,00%	120,00%
KPKNL BJM	10%	0,00%	120,00%
Total Kanwil	10%	0,01%	120,00%

17. IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Unsur	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Capaian Desember
Bimbingan Teknis Kanwil pada KPKNL dan pada pengguna jasa	90	95,63	106,26%



18. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Unit	Target Tahun 2022	Target s.d. Desember	Jumlah Persetujuan yang Diterbitkan Semester II 2021+ Semester I 2022	Jumlah Persetujuan Ditindaklanjuti	% Realisasi	Indeks Capaian s.d. Desember	Indeks Capaian Tahunan
KPKNL PKY	85%	85%	113	113	100,00%	117,65%	117,65%
KPKNL PBN	85%	85%	28	28	100,00%	117,65%	117,65%
KPKNL BJM	85%	85%	142	142	100,00%	117,65%	117,65%
Total Kanwil	85%	85%	283	283	100,00%	117,65%	117,65%

19. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Unit	Target dan Realisasi						Capaian IKU (Capaian Utama + Capaian Tambahan)	Indeks Capaian s.d. Desember
	Target s.d. Desember	Jumlah Total Pegawai	Jumlah Pegawai Memenuhi 24 JP dan Memenuhi Usulan DKI (Desember 2022)	Jumlah Pegawai Memenuhi 24 JP dan telah melebihi kriteria	Capaian			
					Utama	Tambahan		
Kanwil	100,00%	48	48	48	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%
KPKNL PKY	100,00%	23	22	22	95,65%	19,13%	114,78%	114,78%
KPKNL PBN	100,00%	25	25	25	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%
KPKNL BJM	100,00%	31	31	31	100,00%	20,00%	120,00%	120,00%



20. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Tahunan
	Target	Realisasi	
KANWIL	80	97,99	120,00%
KPKNL PKY	80	85,37	106,71%
KPKNL PBN	80	96,32	120,00%
KPKNL BJM	80	88,88	111,10%

21. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)

Unit	Target dan Realisasi			Indeks Capaian
	Target 2022	Target Desember	Realisasi Desember	
KANWIL	95,5%	95,5%	93,70%	98,12%
KPKNL PKY	95,5%	95,5%	94,79%	99,26%
KPKNL PBN	95,5%	95,5%	97,57%	102,17%
KPKNL BJM	95,5%	95,5%	94,96%	99,43%

22. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Target	Realisasi			Indeks Capaian Desember
	Sem 1	Sem 2	Rata-Rata	
3,55	3,89	3,95	3,92	110,42%



2) Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

A) Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

i) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP Aset)

Kanwil	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP – Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	10,00%	30,00%	30,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	MAX/TLK
Realisasi	44,81%	97,04%	97,04%	152,18%	152,18%	375,56%	375,56%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

- Isu Utama yang dihadapi dalam Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian (PNBP Aset) , diantaranya:

1. Pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19
2. Optimalisasi proses tindak lanjut persetujuan pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN

- Implikasi :

Secara umum capaian PNBP yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Negara telah berjalan sangat baik. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemic Covid-19 dan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN secara optimal. Sampai dengan triwulan IV, capaian PNBP aset sebesar Rp57.471.823.853 dari target Rp15.000.000.000 (383,15%). Pencapaian tersebut menandakan bahwa perekonomian semakin membaik dan sinergi antara DJKN dengan stakeholder semakin baik pula.



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian (PNBP Aset) , diantaranya:
 1. Sosialisasi terkait Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah khususnya dalam hal pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN (UND-6/WKN.12/2022)
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan di Q4 (ND-1608/WKN.12/2022, ND-1761/WKN.12/2022)
- Rencana Aksi tahun 2023 :

Mempersiapkan optimalisasi PNBP Tahun 2023 dengan tetap melakukan sosialisasi kepada Korwil dan monitoring evaluasi secara rutin.
- ii) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Piutang Negara)

Kanwil	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP – Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP PN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	10,00%	30,00%	30,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	MAX/TLK
Realisasi	38,09%	67,07%	67,07%	112,36%	112,36%	133,48%	133,48%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

- Isu Utama yang dihadapi dalam Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian (PNBP Piutang Negara) , diantaranya:
 1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara
 2. Penerimaan negara (biad PPN) melalui mekanisme crash program/keringanan utang ataupun non crash program
 3. Terbitnya PP 28 Tahun 2022 dan PMK 137 Tahun 2022
- Implikasi :
 1. Meningkatkan penerimaan negara
 2. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang negara
 3. Percepatan penyelesaian piutang pemda



- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Sumber penerimaan biad PPN, diperoleh dari BKPN lama yang rutin melakukan angsuran
 2. Debitur yang mengikuti crash program tahun 2022 sebesar 7 BKPN, dari potensi BKPN sebesar 42 BKPN
 3. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan
 4. Terdapat piutang pemda yang tidak dapat diserahkan ke PUPN dengan nilai < 8 juta

- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian (PNBP Piutang Negara), diantaranya:
 1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja piutang negara sampai dengan Q4 melalui kegiatan Kupas Piutang Negara
 2. Melakukan Kegiatan Sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN dengan Pemda lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah.

- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dgn seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng
 2. Melakukan sosialisasi PMK 137 tahun 2022 dengan Pemda lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah
 3. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
 - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
 - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.



- iii) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Lelang)

Kanwil	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP – Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP Lelang)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	15,86%	29,80%	29,80%	51,51%	51,51%	113,96%	113,96%	
Capaian	120,00%	99,30%	99,30%	85,83%	85,83%	113,96%	113,96%	

- Isu Utama yang dihadapi dalam Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian (PNBP Lelang) , diantaranya:
 1. Mewujudkan tercapainya target PNBP Lelang.
 2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
 3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
 4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id
 5. Terdapat penurunan kinerja oleh salah satu kantor perwakilan Balai Lelang
- Implikasi :

Potensi lelang laku rendah akibatnya target PNBP Lelang tidak tercapai.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
 2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian (PNBP Lelang), diantaranya:
 1. Meningkatkan koordinasi dan Penggalan Potensi Lelang dengan Pemohon Lelang (kunjungan ke Perbankan, Kejati)
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;
 3. Melakukan koordinasi dengan pembina maupun pelaku dalam kegiatan lelang UMKM melalui kegiatan 9.9 Harat Banar, GNBBI, dan OPOP;
 4. Pelaksanaan Lelang HT akan digiatkan melalui program Borneo Auction Day, Gema auction, Gelegar BNI, dan Expo BTN;
 5. Melakukan pembinaan ke PL I, PL II dan Balai Lelang sekaligus meminta untuk meningkatkan frekuensi permohonan lelang.

- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang;
 2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;
 4. Melaksanakan Program Lelang yang masih berlangsung sampai akhir tahun yaitu BRI dan BNI.

B) Persentase produktivitas lelang

Kanwil	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1b-CP – Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%	MAX/TLK
Realisasi	46,93%	47,74%	47,74%	47,69%	47,69%	47,94%	47,94%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Banyaknya obyek lelang HT yang tidak laku terjual .
 2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19



- Implikasi :
 1. Penerimaan hasil lelang (PNBP dan Pokok Lelang) tidak optimal.
 2. Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Berkurangnya permohonan lelang dari perbankan yang mempunyai potensi laku.
 2. Masyarakat menahan diri untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam penggunaan keuangannya maupun berinvestasi akibat pandemi covid-19 yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Produktivitas Lelang, diantaranya:
 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemohon lelang;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;
 3. Berkoordinasi dengan Perbankan di wilayah Kalimantan Selatan;
 4. Koordinasi dengan KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, Balai Lelang.
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Meningkatkan koordinasi/ komunikasi dengan KPKNL dan Pemohon Lelang baik langsung maupun virtual.
 2. Memberikan pembinaan dan assistensi kepada KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II.
 3. Melakukan publikasi lelang secara massif melalui media sosial KPKNL dan Kanwil.

C) Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

Unit	Target dan Realisasi		Indeks Capaian Tahunan
	Target	Realisasi	
KANWIL	80%	100%	120%



2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

A) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kanwil	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP – Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	21,42%	39,09%	39,09	59,54%	59,54%	106,60%	106,60%	
Capaian	107,09%	97,73%	97,73%	85,06%	85,06%	106,60%	106,60%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Mewujudkan tercapainya target Pokok Lelang.
 2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19
 3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
 4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id
 5. Terdapat penurunan kinerja oleh salah satu kantor perwakilan Balai Lelang
- Implikasi :

Penerimaan hasil lelang rendah akibatnya target pokok lelang tidak tercapai.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
 2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Realisasi Pokok Lelang, diantaranya:
 1. Meningkatkan koordinasi dan Penggalan Potensi Lelang dengan Pemohon Lelang(kunjungan ke Perbankan, Kejati)
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;



3. Melakukan koordinasi dengan pembina maupun pelaku dalam kegiatan lelang UMKM melalui kegiatan 9.9 Harat Banar, GNBBI, dan OPOP.
 4. Pelaksanaan Lelang HT akan digiatkan melalui program Borneo Auction Day, Gema auction, Gelegar BNI dan Expo BTN;
 5. Melakukan pembinaan ke KPKNL, PL II, dan Balai Lelang untuk meningkatkan frekuensi permohonan lelang.
- Rencana Aksi tahun 2023 :
1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang;
 2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;
 4. Melaksanakan Program Lelang yang masih berlangsung sampai akhir tahun yaitu BRI dan BTN.

B) Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Kanwil	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP – Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	MAX/TLK
Realisasi	51,02%	87,55%	87,55%	96,55%	96,55%	103,11%	103,11%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	103,11%	103,11%	

- Isu Utama yang dihadapi :
1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara
 2. Terbitnya PP 28 Tahun 2022 dan PMK 137 Tahun 2022
- Implikasi :
1. Meningkatkan akurasi data piutang negara
 2. Memperbaiki kualitas piutang negara dengan percepatan tahaapan pengurusan piutang negara.
 3. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang
 4. Percepatan penyelesaian piutang pemda



- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
 2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya

- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Penurunan Outstanding Piutang Negara, diantaranya:
 1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja piutang negara sampai dengan Q4 melalui kegiatan Kupas Piutang Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
 2. Melakukan Kegiatan Sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN dengan Pemda lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah.
 3. Melakukan Kegiatan Koordinasi dengan Anggota PUPN dari Unsur Pemerintah Daerah.

- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng
 2. Melakukan sosialisasi PMK 137 tahun 2022 dengan Pemda
 3. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
 - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
 - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.
 3. Mendorong KPKNL untuk berkoordinasi dengan penyerah piutang



3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

A) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kanwil dan KPKNL

Kanwil	SS.3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-N – Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target						4,55	4,55	MAX/TLK
Realisasi						4,80	4,80	
Capaian						105,58%	105,58%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Tuntutan untuk memenuhi ekspektasi pengguna layanan yang tinggi dan berbeda satu sama lain
 2. Tantangan untuk memberikan layanan yang meningkat dari tahun ke tahun
- Implikasi :
 1. Dengan tingkat kepuasan *stakeholder* yang tinggi, tingkat kepatuhan juga diharapkan akan meningkat
 2. Dari sisi teori kinerja, untuk jangka panjang IKU ini tidak dapat diukur dengan IKU Maximize (semakin tinggi semakin baik) melainkan sebaiknya dengan IKU Stabilize (apabila nilai stabil, semakin baik)
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Ekspektasi layanan berbeda-beda antar pengguna layanan
 2. Standar penilaian (baik dan/atau sangat baik) berbeda antara Pengguna Layanan dan Surveyor
 3. Kemungkinan/potensi surveyor yang mengalami salah persepsi/kurang pemahaman



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Kepuasan Pengguna Layanan pada Kanwil dan KPKNL, diantaranya:
 1. Koordinasi Bidang PKN dan Bidang KIHl terkait pemetaan data responden untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengiriman nota dinas dari Bidang KIHl ke Bidang PKN sambil menunggu arahan resmi dari Setditjen.
 2. Melakukan Kegiatan Koordinasi dengan Anggota PUPN dari Unsur Pemerintah Daerah.
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Memberikan informasi pembinaan untuk meningkatkan pelayanan dengan melalui berbagai cara, misal melalui, surat, whatsapp, e-mail, dll
 2. Menyiapkan perangkat survei pada responden dengan survei elektronik (G-form/Microsoft Forms)

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

A) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Kanwil	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP – Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target		50,00%	50,00%	55,00%	55,00%	65,00%	65,00%	MAX/TLK
Realisasi		82,96%	82,96%	81,19%	81,19%	78,60%	78,60%	
Capaian		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Penggunaan/pemanfaatan BMN yang kurang optimal
 2. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengukuran di lapangan dengan jumlah target yg banyak.
 3. Kurangnya pemahaman operator BMN pada satker dalam melaksanakan pendataan SBSK



- Implikasi :
 1. Masih terdapat hasil pengukuran SBSK yang menunjukkan hasil dibawah 65%, dimana artinya penggunaan/pemanfaatan BMN belum optimal.
 2. Perhitungan SBSK atas keseluruhan BMN yang menjadi target tidak dapat diselesaikan awal waktu karena keterbatasan SDM.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Masih belum optimalnya penggunaan/pemanfaatan BMN sesuai dengan SBSK yang berlaku.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, diantaranya:
 1. Melakukan BKO pada KPKNL Palangkaraya
 2. Melakukan verifikasi terhadap perhitungan SBSK atas target di tahun 2022.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan di Q4 (ND-1608/WKN.12/2022, ND-1761/WKN.12/2022).
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Mempersiapkan perhitungan SBSK di tahun 2023
 2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL

B) Tingkat Kesesuaian Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Kanwil	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP – Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	MAX/TLK
Realisasi	4,22%	25,34%	25,34%	49,13%	49,13%	114,05%	114,05%	
Capaian	21,12%	63,36%	63,36%	81,88%	81,88%	114,05%	114,05%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Dokumen kelengkapan yg diajukan oleh satker belum lengkap
 2. Terkendala bidang tanah yang belum *clean and clear*



- Implikasi :
Potensi pensertipikatan tanah BMN terhambat/tidak tepat waktu dan sulit mencari tanah pengganti target.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
Beberapa bidang tanah tidak *clean and clear*, misalnya masuk dalam kawasan hutan, tumpang tindih, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Tingkat Kesesuaian Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan, diantaranya:
 1. Melakukan koordinasi secara intens dengan kpknl, kanwil bpn, satker
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi sertipikasi secara rutin bersama dengan Kanwil BPN beserta Kantah, KPKNL, serta Satker.
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas target pensertipikatan tanah tahun 2023.
 2. Melakukan persiapan untuk program pensertipikatan tanah tahun 2023.

C) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Kanwil	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4c-CP – Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	MAX/TLK
Realisasi	39,39%	87,88%	87,88%	142,42%	142,42%	160,61%	160,61%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara
 2. Terbitnya PP 28 Tahun 2022 dan PMK 137 Tahun 2022



- Implikasi :
 1. Percepatan penyelesaian piutang negara
 2. Memperbaiki kualitas piutang negara dengan percepatan tahaapan pengurusan piutang negara.
 3. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang negara
 4. Percepatan penyelesaian piutang pemda
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Debitur yang mengikuti CP 2022 tidak banyak (9 debitur dari potensi sebanyak 42 debitur), hal ini dikarenakan:

 - a. keberadaan debitur tidak diketahui/ alamat tidak diketemukan,
 - b. debitur tidak memiliki kemampuan membayar, walaupun diberi keringanan
 - c. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan
 - d. Terdapat piutang pemda yang tidak dapat diserahkan ke PUPN dengan nilai < 8 juta
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), diantaranya :
 1. Melakukan Kegiatan Temu Wicara bersama dengan Penyerah Piutang di lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah
 2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan terbaru yaitu PP 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara kepada para stakeholder di lingkup Kalimantan Tengah, sekaligus membahas isu-isu terkini
 3. Melakukan Kegiatan Obrolan Kampus Seputar Piutang Negara di Universitas Lambung Mangkurat
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dgn seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng
 2. Melakukan sosialisasi PMK 137 tahun 2022 dengan Pemda
 3. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
 - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
 - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.
 4. Mendorong KPKNL untuk berkoordinasi dengan penyerah piutang



D) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Kanwil	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4d-N – Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	10,00%	40,00%	40,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	MAX/TLK
Realisasi	21,67%	60,06%	60,06%	93,56%	93,56%	130,27%	130,27%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara
 2. Terbitnya PP 28 Tahun 2022 dan PMK 137 Tahun 2022
- Implikasi :
 1. Percepatan penyelesaian piutang negara
 2. Memperbaiki kualitas piutang negara dengan percepatan tahaapan pengurusan piutang negara.
 3. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang negara
 4. Percepatan penyelesaian piutang pemda
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Debitur yang mengikuti CP 2022 tidak banyak (9 debitur dari potensi sebanyak 42 debitur), hal ini dikarenakan:

 1. keberadaan debitur tidak diketahui/ alamat tidak diketemukan,
 2. debitur tidak memiliki kemampuan membayar, walaupun diberi keringanan
 3. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan
 4. Terdapat piutang pemda yang tidak dapat diserahkan ke PUPN dengan nilai < 8 juta



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), diantaranya:
 1. Melakukan Kegiatan Temu Wicara bersama dengan Penyerah Piutang di lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah
 2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan terbaru yaitu PP 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara kepada para stakeholder di lingkup Kalimantan Tengah, sekaligus membahas isu-isu terkini
 3. Melakukan Kegiatan Obrolan Kampus Seputar Piutang Negara di Universitas Lambung Mangkurat
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dgn seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalselteng
 2. Melakukan sosialisasi PMK 137 tahun 2022 dengan Pemda
 3. Mendorong KPKNL untuk menyusun:
 - a. roadmap percepatan penyelesaian piutang negara dalam 2 tahun kedepan,
 - b. target bersama dan rencana penyelesaian piutang negara dengan penyerah piutang.
 4. Mendorong KPKNL untuk berkoordinasi dengan penyerah piutang

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

A) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Kanwil	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a - CP – Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	MIN/ TLK
Realisasi	0,71%	1,12%	1,12%	1,53%	1,53%	1,38%	1,38%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	



- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN yang digunakan dalam Persetujuan;
 2. Hasil penilaian tersebut merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/ penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang (PB);
 3. Kecenderungan penggunaan nilai taksiran dari pemohon oleh pengelola barang dalam persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN
- Implikasi :

Ketergunaan hasil penilaian menjadi tidak optimal
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

Nilai taksiran dari pemohon dapat digunakan pengelola barang dalam persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN dalam hal nilai taksiran lebih tinggi dari hasil penilaian.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, diantaranya:
 1. Adanya konsolidasi intern terkait upaya pencapaian IKU;
 2. Melakukan pemantauan pencapaian IKU melalui rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian.
 3. Melakukan pemantauan terkait IKU yang kemudian disampaikan ke KPKNL melalui Nota Dinas setiap Awal Bulan
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan monitoring berkala pada link bit.ly/DeviasiHasilPenilaian2022 (yang berisikan data hasil penilaian oleh Penilai, taksiran dari pemohon, nilai persetujuan BMN dari pengelola dan tingkat deviasi ketergunaan hasil penilaian dari masing-masing KPKNL).



6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

A) Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Kanwil	SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a - N – Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	MAX/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	98,84%	98,84%	99,15%	99,15%	
Capaian	108,67%	108,67%	108,67%	107,43%	107,43%	99,15%	99,15%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Mewujudkan pelaksanaan lelang e-auction
 2. Meminimalisir pelaksanaan lelang konvensional
- Implikasi :

Tujuan lelang secara efektif, efisien melalui pemanfaatan teknologi tidak tercapai
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Masih ada pemohon lelang mengajukan lelang konvensional walaupun ada himbauan untuk melaksanakan lelang secara e-auction.
 2. Aplikasi e-auction kurang familiar bagi masyarakat awam khususnya untuk masyarakat di pedesaan.
 3. Lelang konvensional masih dibutuhkan untuk jenis lelang UMKM yang bersamaan dengan kegiatan pameran/ bazaar.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction, diantaranya:
 1. Melaksanakan koordinasi dan penggalan potensi lelang, baik dilaksanakan sendiri maupun bersama KPKNL dalam memasyarakatkan lelang e-auction kepada stakeholder dan pelaku UMKM;
 2. Memberi edukasi kepada UMKM untuk menjadi Pemohon Lelang secara online.
 3. Melaksanakan lelang UMKM secara konvensional namun tetap memperhatikan capaian lelang e-auction



➤ Rencana Aksi tahun 2023 :

1. Meningkatkan koordinasi kepada stakeholder terkait kelebihan pelaksanaan lelang e-auction.
2. Meningkatkan koordinasi terhadap pemohon Lelang khususnya Pemerintah Daerah untuk kepentingan lelang BMD dan lelang UMKM.

7. Edukasi yang Efektif

A) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Kanwil	SS.7 Edukasi yang Efektif							
	7a-N – Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target		90	90	90	90	90	90	MAX/AVG
Realisasi		96,36	96,36	96,36		94,90	95,63	
Capaian		107,07%	107,07%	107,07%		105,44%	106,26%	

➤ Isu Utama yang dihadapi :

1. Kegiatan terkait tugas dan fungsi terhambat dikarenakan berbagai macam kejadian.
2. Keperluan KPKNL atas informasi Kanwil dan sebaliknya dengan cepat dan akurat
3. Dana pembinaan tidak mungkin untuk memenuhi seluruh kegiatan pembinaan langsung
4. Pentingnya peningkatan pemahaman penilai dan pegawai di Bidang Teknis terkait peraturan terkait
5. Terbitnya peraturan baru dalam masa-masa New Normal

➤ Implikasi :

1. Perlu dana dan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan pembinaan KPKNL
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalselteng, maka pola pembinaan akan dilaksanakan melalui *Tele Conference* dan Aplikasi Pembinaan yang berbasis IT, misalnya **Microsoft Teams**.
3. Kegiatan edukasi dan komunikasi terhadap stakeholder ataupun KPKNL beragam



- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Adanya keterbatasan dana dalam DIPA sehingga menyebabkan beberapa tugas dan fungsi termasuk kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan optimal.
 2. Adanya mutasi pejabat maupun pegawai sehingga perlu diadakan penyegaran terkait peraturan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi;
 3. Persepsi kualitas bimbingan teknis dari seluruh Bidang/Bagian sehingga nilai yang diberikan bervariasi dari setiap responden sehingga mempengaruhi hasil perhitungan.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai efektivitas edukasi dan komunikasi, diantaranya:
 1. Menyampaikan bahan masukan berupa formula-formula yang akan dikompulsi pada aplikasi dalam rangka pembinaan terpadu (Alabio KST). Adapun untuk tahun 2022, pembinaan dengan aplikasi Alabio dilakukan secara triwulanan yang mana tahun 2021 dilaksanakan secara semesteran.
 2. Melakukan FGD terkait proses bisnis Bidang Teknis maupun Bagian Supporting Unit dengan KPKNL melalui Zoom agar mempermudah untuk menjalankan pekerjaan di lapangan.
 3. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap KPKNL di wilayah kerja
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Sosialisasi terkait tugas dan fungsi (jika ada yang baru).
 2. Menginformasikan informasi terbaru terkait tugas dan fungsi melalui sosial media.
 3. Melakukan Pembinaan pada KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalselteng
 4. Melakukan pembinaan lebih intensif ke KPKNL (diskusi informal) dengan memanfaatkan seluruh media yang ada baik Surat, WAG, Email, Medsos, Vicon, atau kunjungan langsung
 5. Mengoptimalkan aplikasi ALABIO sebagai media Kanwil dalam memberikan pembinaan secara daring pada KPKNL



8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

A) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Kanwil	SS.8 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	8a-CP – Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target		40,00%	40,00%			85,00%	85,00%	MAX/TLK
Realisasi		83,39%	83,39%			100%	100%	
Capaian		120,00%	120,00%			117,65%	117,65%	

- Isu Utama yang dihadapi :
Satuan kerja tidak langsung menindaklanjuti surat persetujuan yang telah ditetapkan
- Implikasi :
Surat persetujuan yang belum ditindaklanjuti menjadikan persentase tindak lanjut pengelolaan BMN belum maksimal. Namun, pada triwulan IV tahun 2022, semua surat persetujuan telah ditindaklanjuti sehingga capaian semua KPKNL adalah 100%.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
Tidak semua calon mitra langsung menyetujui nilai yang ditetapkan oleh pengelola barang.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara, diantaranya :
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan di Q4 (ND-1608/WKN.12/2022, ND-1761/WKN.12/2022)
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian
 2. Melakukan kunjungan ke Koordinator Wilayah dalam rangka sosialisasi tindak lanjut persetujuan sekaligus dengan PNB



9. SDM yang Kompeten

A) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kanwil	SS.9 SDM yang Kompeten							
	9a-N – Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	26,34%	114,15%	114,15%	102,50%	102,50%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

➤ Isu Utama yang dihadapi :

1. Penetapan keadaan darurat bencana alam COVID-19, semakin banyak pelatihan/ pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara online/ mandiri.
2. Sertifikat pelatihan berupa e-sertifikat yang dikirim langsung ke akun pegawai baik melalui HRIS maupun semantik.bppk.kemenkeu.go.id, pengelola kepegawaian tidak punya alat untuk memonitor sertifikat yang sudah diterima oleh pegawai.
3. Persentase untuk pengembangan kompetensi pegawai sudah melebihi target namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Implikasi :

Walaupun realisasi IKU Q4 telah tercapai namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Ada pegawai yg tidak aktif untuk melaksanakan *e-learning open class* yang ditawarkan melalui klc2.kemenkeu.go.id dan <http://10.242.77.20/diklat>.
2. Kesulitan pencatatan/ pendataan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai.
3. Pelaksanaan sharing knowledge masih dilaksanakan guna memfasilitasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan.



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai pengembangan kompetensi pegawai, diantaranya :
 1. Melakukan pendataan sertifikat diklat
 2. Mengusulkan diklat secara e-learning dengan tema yang beragam sehingga pegawai berminat utk diklat secara e-learning
 3. Membuat Undangan pelaksanaan sharing knowledge pegawai sesuai jadwal
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Memonitor Capaian realisasi iku setiap triwulan
 2. Mengusulkan diklat secara e-learning dengan tema yang mengutamakan sesuai dengan tusinya.
 3. Melakukan pendataan dan pengumpulan sertifikat diklat.

10. Organisasi yang Fit For Purpose

A) Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Kanwil	SS.10 Organisasi yang Fit For Purpose							
	10a-N – Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target						80	80	MAX/TLK
Realisasi						97,99	97,99	
Capaian						120,00%	120,00%	

- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Pertanggungjawaban Dokumen Kinerja merupakan milik Pegawai dan Atasan Langsungnya
 2. Penyusunan Kontrak Kinerja yang dilakukan mendekati tanggal 31 Januari 2022 dan penyusunan Manual IKU Kemenkeu-Two yang mengalami kendala karena terkendali di Birocankeu.



- Implikasi :
 1. Tingkat kesadaran pegawai atas isi dokumen kinerja yang dimilikinya harus tinggi
 2. Atasan langsung harus sering memantau target dan realisasi kinerja bawahannya
 3. Kesulitan dalam menyusun rencana edukasi kinerja

- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Tingkat pemahaman pegawai terhadap pengisian Manual IKU belum merata
 2. Kesulitan dalam pengisian format slide DKO (IIAA)
 3. Terdapat beberapa rencana aksi yang meleset dari perencanaan
 4. Pelaksanaan Edukasi Kinerja yang masih belum maksimal/dilaksanakan secara triwulanan sehingga nilai pada komponen edukasi belum optimal.

- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja, diantaranya :
 1. Meningkatkan sosialisasi kinerja
 2. Penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2022
 3. Berkoordinasi dengan Bagian Umum pada t-1 penilaian terkait pemenuhan dokumen perencanaan kinerja seperti DIPA dan Resource Forum
 4. Membuat infografis terkait kinerja
 5. Aktif berkoordinasi dengan Bidang, Bagian dan KPKNL terkait perkembangan capaian kinerja dan laporan ke Seksi KI
 6. Menyusun tautan yang berisi informasi terkait Dokumen Kinerja di lingkungan Kanwil melalui bit.ly/KK-KST-2022
 7. Menyusun tautan yaitu bit.ly/KST-CAPKIN-2022 yang berisi informasi terkait Laporan Capaian Kinerja Bidang Teknis

- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait kinerja ke internal Kanwil maupun KPKNL melalui pembinaan
 2. Menyusun ND ke Bidang/Bagian untuk melakukan penyusunan Kontrak Kinerja dan mendokumentasikannya dengan baik



11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

A) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Kanwil	SS.11 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	11a-Cp – Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/TLK
Realisasi	98,85%	95,11%	95,11%	97,33%	97,33%	93,70%	93,70%	
Capaian	103,51%	99,59%	99,59%	101,92%	101,92%	98,12%	98,12%	

➤ Isu Utama yang dihadapi :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat Reformulasi IKPA 2022.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.

➤ Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Terdapat pendetailan sampe 16 segmen CoA pada Aplikasi SAKTI sehingga mempengaruhi fleksibilitas anggaran yang digunakan.
2. Adanya kebutuhan kantor yang meningkat pada akhir tahun menyebabkan penyerapan yang tinggi sehingga nilai efisiensi kecil.

➤ Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai kualitas pelaksanaan anggaran, diantaranya :

1. Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin di awal bulan;
2. Rapat monitoring dan evaluasi anggaran dan rencana kerja yang dilaksanakan setiap awal bulan;



3. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA, Kanwil Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran demi terlaksananya penyerapan anggaran yang optimal;
 4. Permintaan Rencana Kerja selama Triwulan IV pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
 5. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.
- Rencana Aksi tahun 2023 :
1. Melakukan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Pencapaian Nilai IKU IKPA pada komponen Halaman IV DIPA.
 2. Meningkatkan kolaborasi antara PPK, Pejabat Pengadaan, Subbagian TURT dan Bidang/Bagian.
 3. Melaksanakan rapat dan pelaporan rutin setiap bulan.
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian mengenai rencana kerja TA 2023

12. Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

A) Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan

Kanwil	SS.12 Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							
	12a-N – Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target		3,55	3,55		3,55	3,55	3,55	MAX/AVG
Realisasi		3,89	3,89		3,89	3,95	3,92	
Capaian		109,58%	109,58%		109,58%	111,26%	110,42%	

- Isu Utama yang dihadapi :
1. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan terdiri dari 3 (tiga) unsur pengukuran yang masing-masing memiliki pembobotan sehingga unsur-unsur penilaian tersebut harus terpenuhi agar capaian optimal
 2. IKU mandatori langsung dari Sekretariat Jenderal yang mendukung terciptanya Kemenkeu Satu



- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Potensi kurangnya pegawai yang membantu pelaksanaan/implementasi employee advocacy
 2. Merupakan IKU yang dimandatkan kepada seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga apabila capaiannya kurang optimal akan terlihat.

- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mencapai Efektivitas ekosistem kehumasan, diantaranya :
 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan Humas terkait strategi komunikasi yang dilaksanakan di kanwil
 2. Melakukan input dan monev berkala capaian iku ini pada link yang telah disediakan oleh Kantor Pusat

- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Melaksanakan agenda setting yang telah dikoordinasikan oleh kantor pusat dengan tertib.
 2. Menyebarkan informasi kemenkeu satu dengan banyak hastag agar komponen penilaian IKU ini dapat terpenuhi
 3. Mengarahkan pegawai di internal Kanwil maupun KPKNL (melalui Seksi HI) untuk melakukan amplifikasi konten dari Biro K/LI



B. Realisasi Anggaran

1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

A. Data Bobot Dan Capaian IKPA

Indikator IKPA	Triwulan I			Triwulan II		
	Bobot Indikat or IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikat or IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Revisi DIPA	0%	100,00%	0,00%	10%	100,00%	10,00%
Hal III DIPA	10%	100,00%	10,00%	10%	90,78%	9,08%
Penyerapan Anggaran	0%	78,80%	0,00%	20%	85,16%	17,03%
Belanja Kontraktual	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00%	10,00%	10%	99,76%	9,98%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Capaian Output	25%	97,69%	24,42%	25%	100,00%	25,00%
Total	50%		49%	80%		76%
Total Nilai Akhir IKPA	98,85%			95,11%		

Indikator IKPA	Triwulan III			Triwulan IV		
	Bobot Indikat or IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikat or IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%
Hal III DIPA	10%	93,65%	9,37%	10%	94,77%	9,48%
Penyerapan Anggaran	20%	92,59%	18,52%	20%	95,06%	19,01%
Belanja Kontraktual	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	99,82%	9,98%	10%	82,50%	8,25%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Capaian Output	25%	100,00%	25,00%	25%	100,00%	25,00%
Total	80%		78%	80%		77%
Total Nilai Akhir IKPA	97,33%			95,92%		



B. Data Capaian Keluaran

Keluaran / Komponen	Target	Satuan	Capaian Rincian Output (RVRO)			
			s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV
1 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	70	Orang	99	5	267	
2 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	150	Orang	61	65	325	
3 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	1	Rekomendasi	0	0	0	
4 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	1	Surat Persetujuan/Penolaka	1	0	0	
5 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	26	BKPN	35	22	38	
6 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	1089	Rekomendasi	38	245	252	
7 Rekomendasi Kekayaan Negara	1	Rekomendasi	0	0	0	
8 Rekomendasi Hasil Penilaian	1	Rekomendasi	0	1	0	
9 Penggalan Potensi Lelang	15	Rekomendasi	11	8	7	
10 Aset BUN yang Dikelola	12	Aset	0	0	0	
11 Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	1	Rekomendasi	1	1	0	
12 Layanan Bantuan Hukum	2	Perkara	9	1	6	
13 Kerumahtanggaan	12	Layanan	3	3	3	
14 Layanan Perkantoran	12	Layanan	3	3	3	
15 Peralatan Fasilitas Perkantoran		Unit				
16 Kendaraan Bermotor		Unit				
17 Gedung/Bangunan		m2				
18 Pembinaan/Edukasi Publik	3	Orang	3	1	0	
19 Kehumasan	5	Kegiatan	13	20	15	
20 Pameran/Eksibisi	8	Kegiatan	41	37	20	
21 Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Rekomendasi	1	1	1	

C. Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Bulanan

Triwulan / Bulan		Rencana Penarikan Dana	Realisasi Penyerapan	Deviasi	%Deviasi	Nilai IKPA
Triwulan I	Januari	34.718.441	34.174.719	544.022	1,57	100,00
	Februari	80.166.998	80.167.080	82	0,00	100,00
	Maret	133.747.750	133.090.306	657.444	0,49	100,00
Triwulan II	April	170.512.548	172.223.734	1.711.186	1,00	100,00
	Mei	294.841.466	146.920.094	147.921.372	50,17	89,35
	Juni	315.518.165	308.848.918	6.669.247	2,11	90,78
Triwulan III	Juli	153.730.699	153.872.773	142.074	0,09	92,08
	Agustus	183.477.703	183.699.677	221.974	0,12	93,06
	September	229.357.026	232.977.639	3.620.613	1,58	93,65
Triwulan IV	Oktober	118.699.998	118.734.359	34.361	0,03	94,28
	November	111.999.998	112.408.770	408.772	0,36	94,77
	Desember	111.999.998	112.408.770	408.772	0,36	94,77



1. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan I

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
A) Nilai IKPA			98,85%
	1.	Revisi DIPA	0,00%
	2.	Hal III DIPA	10,00%
	3.	Penyerapan Anggaran	0,00%
	4.	Belanja Kontraktual	0,00%
	5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
	7.	Dispensasi SPM	5,00%
	8.	Capaian Output	24,42%
B) Nilai SMART			0,00%
Capaian Triwulan I			98,85%

➤ Isu Utama yang dihadapi :

1. Terdapat Reformulasi IKPA 2022 yang terdiri dari 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) serta 13 indikator yang terdiri dari revisi DIPA (10%), deviasi halaman III DIPA (10%), data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%), dispensasi SPM (5%), penyerapan anggaran (20%), capaian output (25%);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi.

➤ Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Tidak tercapainya Penyerapan pada Triwulan I yang berdampak pada target Penyerapan di Triwulan II;
2. Satker hanya diberi kesempatan min 1 kali revisi setiap triwulan agar tidak mengurangi nilai IKPA;
3. Terdapat pendetailan sampe 16 segmen CoA pada Aplikasi SAKTI sehingga mempengaruhi fleksibilitas anggaran yang digunakan.



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Pencapaian Nilai IKU IKPA pada komponen Halaman III DIPA.
 2. Melanjutkan program kerja dengan memperhatikan protocol Kesehatan sebagai antisipasi dampak covid-19 di lingkungan kantor.
 3. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian mengenai rencana kerja triwulan II.
- Rekomendasi Rencana Aksi :
1. Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin di awal bulan;
 2. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan demi terlaksananya penyerapan anggaran yang optimal;
 3. Permintaan Rencana Kerja dan usulan revisi anggaran selama Triwulan II pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan

B. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan II

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
A) Nilai IKPA			95,11%
	1.	Revisi DIPA	10,00%
	2.	Hal III DIPA	9,08%
	3.	Penyerapan Anggaran	17,03%
	4.	Belanja Kontraktual	0,00%
	5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	9,98%
	7.	Dispensasi SPM	5,00%
	8.	Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART			0,00%
Capaian Triwulan II			95,11%



- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat Reformulasi IKPA 2022;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran;
 3. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-100/PB/2022 Tentang Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan PNBP Tahap I TA 2022 pada DJKN, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mendapat alokasi PNBP sebesar Rp 16.136.000

- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Perubahan persentase penyerapan anggaran Triwulan II TA 2022 dari yang semula 40% menjadi 50% dan bertepatanannya Triwulan II dengan ramadhan-idul fitri menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran;
 2. Rencana Penarikan Dana pada Triwulan II tidak terealisasi dengan baik sehingga menyebabkan nilai Halaman III DIPA tidak maksimal;
 3. Kurang maksimalnya penggunaan dana PNBP pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
 4. Terdapat pendetailan sampe 16 segmen CoA pada Aplikasi SAKTI sehingga mempengaruhi fleksibilitas anggaran yang digunakan.

- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
 1. Melakukan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Pencapaian Nilai IKU IKPA pada komponen Halaman III DIPA;
 2. Meningkatkan kolaborasi antara PPK, Pejabat Pengadaan dan TURT khususnya dalam pelaksanaan realisasi belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran;
 3. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian mengenai rencana kerja triwulan III.



➤ Rekomendasi Rencana Aksi :

1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin di awal bulan;
2. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan demi mengoptimalkan penyerapan anggaran;
3. Telah dilaksanakan Permintaan Rencana Kerja dan usulan revisi anggaran selama Triwulan II pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
4. Telah dilaksanakan koordinasi terkait penyerapan anggaran setiap bulan dengan seluruh bidang dan bagian.

C. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan III

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
A) Nilai IKPA			97,33%
	1.	Revisi DIPA	10,00%
	2.	Hal III DIPA	9,37%
	3.	Penyerapan Anggaran	18,52%
	4.	Belanja Kontraktual	0,00%
	5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	9,98%
	7.	Dispensasi SPM	5,00%
	8.	Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART			0,00%
Capaian Triwulan III			97,33%

➤ Isu Utama yang dihadapi :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat Reformulasi IKPA 2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.

➤ Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Adanya kenaikan harga BBM, tarif listrik dan tarif air sehingga harus dilakukan revisi terkait anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin, listrik dan air;
2. Terdapat pendetailan sampe 16 segmen CoA pada Aplikasi SAKTI sehingga mempengaruhi fleksibilitas anggaran yang digunakan.



- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
1. Melakukan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Pencapaian Nilai IKU IKPA pada komponen Halaman III DIPA;
 2. Meningkatkan kolaborasi antara PPK, Pejabat Pengadaan, Subbagian TURT, dan Bidang/Bagian khususnya dalam pelaksanaan realisasi belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran;
 3. Melaksanakan rapat dan pelaporan rutin;
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian mengenai rencana kerja triwulan IV.
- Rekomendasi Rencana Aksi :
1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin di awal bulan;
 2. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan demi mengoptimalkan penyerapan anggaran;
 3. Telah dilaksanakan Permintaan Rencana Kerja dan usulan revisi anggaran selama Triwulan III pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
 4. Telah dilaksanakan koordinasi terkait penyerapan anggaran setiap bulan dengan seluruh bidang dan bagian.

D. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
A) Nilai IKPA			95,92%
	1.	Revisi DIPA	10,00%
	2.	Hal III DIPA	9,48%
	3.	Penyerapan Anggaran	19,01%
	4.	Belanja Kontraktual	0,00%
	5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	8,25%
	7.	Dispensasi SPM	5,00%
	8.	Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART			92,21%
Capaian Triwulan IV			93,70%



- Isu Utama yang dihadapi :
 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat Reformulasi IKPA 2022;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.
- Akar permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 1. Adanya kenaikan harga BBM, tarif listrik dan tarif air sehingga harus dilakukan revisi terkait anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin, listrik dan air;
 2. Terdapat pendetailan sampai 16 segmen CoA pada Aplikasi SAKTI sehingga mempengaruhi fleksibilitas anggaran yang digunakan.
- Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilaksanakan, diantaranya :
 1. Melakukan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Pencapaian Nilai IKU IKPA pada komponen Halaman III DIPA;
 2. Meningkatkan kolaborasi antara PPK, Pejabat Pengadaan, Subbagian TURT, dan Bidang/Bagian khususnya dalam pelaksanaan realisasi belanja sesuai dengan rencana penyerapan anggaran;
 3. Melaksanakan rapat dan pelaporan rutin;
 4. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian mengenai rencana kerja TA 2023.
- Rencana Aksi tahun 2023 :
 1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin di awal bulan;
 2. Telah dilaksanakan Revisi Kewenangan KPA dan Kanwil Perbendaharaan demi mengoptimalkan penyerapan anggaran;
 3. Telah dilaksanakan Permintaan Rencana Kerja dan usulan revisi anggaran selama Triwulan III pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
 4. Telah dilaksanakan koordinasi terkait penyerapan anggaran setiap bulan dengan seluruh bidang dan bagian.

C. Inovasi

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan kualitas kinerja dan pembinaan, kami melakukan beberapa inovasi, baik di bidang Non IT maupun IT, antara lain sebagai berikut :

Inovasi Non-IT :

- ♦ Pelaksanaan pelayanan Penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan, dari 15 hari kerja, menjadi hanya 13 hari kerja;
- ♦ Pelaksanaan pelayanan Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan dari 25 hari kerja, menjadi hanya 20 hari kerja;
- ♦ Penyampaian Surat Pemberitahuan Keputusan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Instansi Pemerintah Daerah dari 15 hari kerja menjadi 7 hari kerja.

Inovasi IT :

- ♦ **Aplikasi Alabio** adalah aplikasi pembinaan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kepada KPKNL yang dilakukan secara online. Keunggulan Alabio adalah Aplikasi Alabio sudah di hosting di server kemenkeu.go.id dengan alamat alabio.kemenkeu.go.id



Halaman Utama Aplikasi Alabio

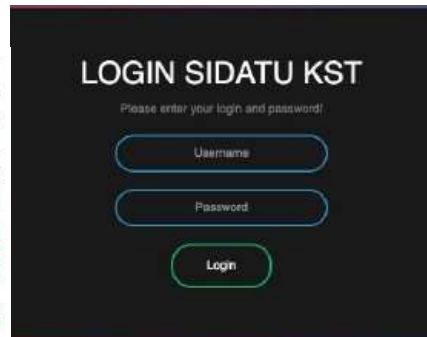
- **Aplikasi SiDatu** adalah aplikasi online yang memiliki fitur terkait layanan DJKN maupun konsultasi online. Aplikasi ini dapat diunduh dan tersedia di Play Store.

Keunggulan SiDatu:

1. Mudah diakses melalui internet : kanwilkst.ddns.net/sidatu/
2. Playstore (Untuk Stakeholder) :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sidatu.sidatu>

3. Scan QR Code



- **Scan QR Code pada Aplikasi Peduli Lindungi.** Dalam rangka penguatan protokol kesehatan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam TataKelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi COVID-19. Scan QR Code dilakukan oleh seluruh pejabat/pegawai/tamu yang akan memasuki dan meninggalkan gedung Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. QR Code tersebut terdapat di Pintu Utama dan Pintu Samping





- **Aplikasi SIBEKANTAN KST** adalah alat bantu sistem money yang memudahkan dalam monitoring dan evaluasi sasaran strategis dan mendapatkan informasi terkait capaian kinerja secara cepat dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Aplikasi ini dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses menggunakan browser melalui alamat https://sites.google.com/view/si-bekantan_



D. Prestasi dan Penghargaan

Sebagai bukti dari hasil kerja keras kami selama ini, kami telah berhasil mendapat penghargaan, yaitu :

1. Penghargaan atas Kerja Sama menyelesaikan Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara berupa Tanah Tahun Anggaran 2020





2. Penghargaan atas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah.



3. Penghargaan atas Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Pengelolaan Arsip 2020 Tingkat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

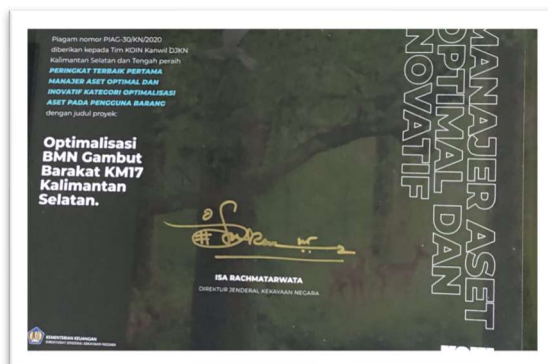




4. Penghargaan atas Kinerja Terbaik sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam Lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan KMK Nomor 488/KMK.01/2020



5. Penghargaan Juara 1 atas Kompetensi KOIN Asset Manager DJKN 2020 dalam Kategori Optimalisasi Aset pada Pengguna Barang (PENG-3/KN/2021).





6. Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



7. Penghargaan Peringkat I atas Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2021





8. Penghargaan atas Kinerja Terbaik III dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 (Satker Pagu Kecil)



9. Penghargaan atas Kinerja Terbaik I dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 (Satker Pagu Kecil)





10. Penghargaan Juara I Lomba Kolaborasi Digital Kemenkeu Kategori Kantor Wilayah Tahun 2022 (NOMOR ND-1421/IT/2022)



BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melakukannya dengan penuh kesungguhan yang berdampak pada pencapaian IKU yang telah ditargetkan. Terdapat beberapa kunci sukses dalam pencapaian IKU sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pola kerja dan *mindset* bekerja dengan kondisi tatanan normal baru dengan mematuhi protokol kesehatan.
2. Menyusun database sehingga terbentuk validasi data dimana sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis untuk memudahkan dalam pencapaian target IKU.
3. Bersinergi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan internal yaitu antar Bidang/Bagian maupun dengan masing-masing KPKNL, serta eksternal dengan semua *stakeholder* sehingga memiliki persepsi dan langkah yang sama dalam pencapaian IKU.
4. Melakukan *monev* secara berkala untuk mengevaluasi tahapan pencapaian target per periode.

Selanjutnya, sangat diharapkan apa yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat luas bagi masyarakat, bangsa dan negara.